

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa program desa inklusif di Desa Bedali belum sepenuhnya memenuhi prinsip *human governance*. Karena dari 9 prinsip pencapaian tujuan, masih 7 prinsip yang terlaksanakan pada program desa inklusif yang meliputi pendidikan bagi warga negara, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, sustainabilitas, bantuan subsidi, kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif, dan reliabilitas. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas sosial dan kompetisi di tingkat global belum terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akuntabilitas sosial belum terlaksana. Meskipun para pemangku kepentingan telah merealisasikan Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif Disabilitas sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Namun, tidak terdapat untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan desa inklusif kepada masyarakat. Hal tersebut berakibat pada dokumen terkait penyelenggaraan desa inklusif di Desa Bedali tidak tersusun dengan rapi.
2. Pendidikan bagi warga negara telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses informasi kegiatan pemberdayaan, edukasi penyadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, serta dibentuknya kader desa yang memiliki wawasan inklusif di Desa Bedali.

3. Kesamaan dan kebebasan telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan sarana yang aksesibel bagi masyarakat penyandang disabilitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Serta memiliki kebebasan berkumpul dalam organisasi di Desa Bedali.
4. Partisipasi telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan musyawarah desa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Desa Bedali termasuk perwakilan kelompok masyarakat penyandang disabilitas.
5. Sustainibilitas telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, program pemberdayaan diselaraskan berdasarkan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas serta kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan, daerah, dan budaya Desa Bedali.
6. Bantuan subsidi telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan Pemerintah Desa Bedali yang telah memberikan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
7. Kompetisi di tingkat global belum terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan tidak ada peraturan desa tentang desa inklusif di Desa Bedali.
8. Kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan pelayanan publik yang setara bagi masyarakat non disabilitas dan penyandang disabilitas.
9. Reliabilitas telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan terjalinnya hubungan baik antara Pemerintah Desa Bedali dengan masyarakat

penyandang disabilitas melalui kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka dapat disarankan adalah:

1. Pemerintah Desa Bedali perlu membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan desa inklusif yang dilakukan secara berkala. Meningkatkan kinerja pengelolaan *website* pemerintah desa, agar masyarakat memiliki akses informasi terhadap perkembangan pembangunan desa. Serta diperlukan pelatihan manajemen arsip bagi pegawai Pemerintah Desa Bedali agar seluruh dokumen terkait pelaksanaan desa inklusif tersusun rapi dan tersimpan secara sistematis.
2. Peraturan desa mengenai desa inklusif di Desa Bedali perlu untuk segera untuk disusun dan disahkan.